

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dimulai pada era orde lama, orde baru, dan reformasi. Jelas telah nampak perubahan dan kemajuan pada daerah-daerah di Indonesia dengan banyaknya pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan tata pariwisata dan kota sejak dimulai sistem desentralisasi tetapi dibalik semua kemajuan dan perkembangan daerah-daerah yang berhasil dalam memajukan daerahnya ada juga daerah yang tidak maju dan merasa kurang diperhatikan dan menimbulkan konflik internal dan ancaman bagi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berikut akan kita bahas mengenai permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Sejak diberlakukan UU Nomor 32 tahun 1999 yang kemudian disusul dengan UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang secara substansial memberikan otonomi kepada daerah provinsi dan kabupaten serta pemerintahan kota suatu kewenangan serta otonomi yang lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Ada beberapa hal yang menandai adanya otonomi daerah di Indonesia misalnya: diserahkannya berbagai urusan kepada daerah, pemilihan kepala daerah secara langsung, semakin banyaknya daerah baru hasil dari pemekaran daerah, dan lahirnya beberapa partai lokal.

Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena

sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau terpingirkan. Pada masa orde baru, pengerukan potensi daerah kepusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis akan bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut.

Adanya otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mencapai *good governance*. Makna dari *governance* dan *good governance* pada dasarnya tidak diatur dalam sebuah undang-undang. Tetapi dapat dimaknai bahwa *governance* adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan yang artinya kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* itu sendiri memiliki unsur kata kerja yaitu *governing* yang berarti fungsi pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) yang dilaksanakan secara seimbang dan partisipatif.

Sedangkan *good governance* adalah tata pemerintahan yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). *Clean government* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good corporate* adalah tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih. *Governance without goverment* berarti bahwa pemerintah tidak selalu di warnai dengan lembaga, tapi termasuk dalam makna proses pemerintah (Prasetijo, 2009).

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan *good governance* adalah akuntansi. Akuntansi pada hakikatnya merupakan proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara kepada laporan keuangan daerah. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan semakin berkembang baik jika didukung oleh system akuntansi yang dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah berhak memperoleh informasi atas kinerja pemerintah, hal tersebut ada dalam konteks demokrasi. Dengan adanya akuntabilitas pemerintah daerah, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraannya akan berlangsung dengan baik. Pengungkapan suatu laporan keuangan akan mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah.

Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan kekayaan daerah.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember Tahun 2015 sampai Tahun 2017 yang mengalami penurunan tiap tahunnya dalam mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Dibuktikan dengan beberapa penurunan yang terjadi berdasarkan analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015 sampai Tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 1.1****Laporan Realisasi Anggaran Belanja****Per 31 Desember Tahun 2015 sampai Tahun 2017**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
2015	1.037.141.938.660	959.735.733.626	92,53 %	Tidak mencapai target
2016	1.022.513.459.601	896.581.555.484	87,68 %	Tidak mencapai target
2017	987.795.627.069	827.988.006.406	83,82 %	Tidak mencapai target

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Ciamis Tahun Anggaran 2015-2017

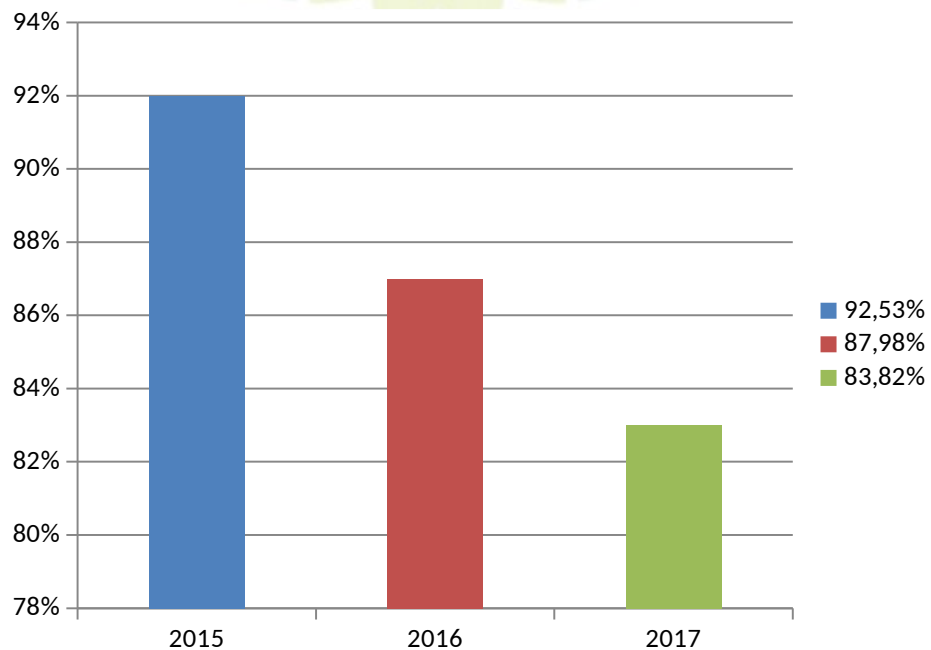


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Berdasarkan tabel 1.1 diatas 3 tahun Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember, diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan dalam mencapai target realisasi anggaran belanja, hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase realisasi belanja yang disajikan, pada tahun 2016 hanya mencapai 87,68% dari target anggaran yang telah ditetapkan yaitu 1.022.513.459.601 dan tahun 2017 hanya mencapai 83,82% dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar 987.795.627.069.

Selain itu dapat dilihat selama 3 tahun Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2017 mengalami penurunan persentase realisasi anggaran dari anggaran yang di targetkan. Pada tahun 2015 anggaran yang terealisasi mencapai 92,53% dari target 1.037.141.938.660, lalu tahun 2016 anggaran yang terealisasi mencapai 87,68% dari target anggaran yang telah ditetapkan yaitu 1.022.513.459.601 dan pada tahun 2017 anggaran yang terealisasi mencapai 83,82% dari anggaran yang ditetapkan yaitu 987.795.627.067. melalui persentase realisasi anggaran tersebut terlihat jelas penurunan yang signifikan pada 3 tahun Laporan Realisasi Anggaran.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Rekapitulasi Penggunaan Anggaran**



Hal diatas membuktikan bahwa tidak efisien nya penggunaan anggaran yang telah ditetapkan untuk pencapaian kinerja yang telah direncanakan

sebelumnya. Selain itu masih ditemukannya defisit pada laporan keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang terlihat adanya sisa anggaran yang terdapat pada laporan keuangan yang disajikan.

Melihat hal terjadi seharusnya pengelolaan pemerintah daerah terutama dalam pelaporan keuangan harus akuntabel dan diawasi (*checks and balance*) untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Semakin baik akuntabilitas suatu pemerintah daerah maka semakin meminimalisir terjadinya keterlambatan oleh pihak pemerintah daerah (*agent*). Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan laporan keuangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis merupakan salah satu instansi pemerintahan yang wajib melaporkan atau melakukan akuntabilitas dan transparansi atas program-programnya. Pengelolaan keuangan seperti perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan pengendalian serta salah satunya akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah.

Tabel 1.2

## Data Anggaran dan Realisasi Keuangan serta Target Kinerja per 31

Desember 2017

No	Program Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	<b>URUSAN</b>			
	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>			
	- Pengembangan pendidikan anak usia dini	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Biaya operasional pendidikan anak usia dini	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00
	- Biaya umum pengelolaan DAK BOP PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>			
	- Pembangunan gedung sekolah	4.278.957.500,00	4.275.627.950,00	99,92
	- Pembangunan ruang ibadah	200.705.000,00	200.705.000,00	100,00
	- Pengadaan buku dan alat tulis siswa	664.000.000,00	655.792.700,00	98,76
	- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	269.900.000,00	269.525.000,00	99,86
	- Pengadaan meubelair sekolah	70.500.000,00	70.500.000,00	100,00
	- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	499.236.000,00	499.086.000,00	99,97
	- Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	19.718.000,00	19.718.000,00	100,00
	- Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SD	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
	- Lomba siswa berprestasi SD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Lomba siswa berprestasi SMP	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
	- Lomba Calistung (Baca, Tulis, Hitung)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Pelaksanaan Ujian Sekolah Madrasah (USM)	97.500.000,00	97.500.000,00	100,00
	- Penanggulangan kemiskinan siswa rawan DO tingkat SMP	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
	- Pelaksanaan UN SMP	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00

Dipindahkan				
1	2	3	4	5
	- Monev BOS dan PIP SD/SMP	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
	- Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa SMP	262.500.000,00	262.500.000,00	100,00
	- Olimpiade Sains nasional SD	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
	- Olimpiade Sains nasional SMP	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
	- <b>Peningkatan kualitas pendidikan SD (DAK)</b>	<b>13.216.687.000,00</b>	<b>8.086.900.000,00</b>	<b>61,19</b>
	- Peningkatan kualitas pendidikan SMP (DAK)	13.094.036.000,00	12.966.474.636,00	99,03
	- Workshop aplikasi BOS	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
	- Sapta lomba PAI SD dan SMP	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
	- Pengerasan dan pengaspalan jalan sekolah	503.983.500,00	503.983.500,00	100,00
	- Peningkatan kompetensi guru-guru TK/SD dan SD/SMP satu atap	97.500.000,00	97.500.000,00	100,00
	- Peningkatan kesejahteraan guru bantu SD/MI daerah terpencil	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00
	- Peningkatan kesejahteraan guru non PNS di daerah terpencil	402.000.000,00	402.000.000,00	100,00
	- Pengadaan buku rapot siswa	215.000.000,00	212.505.000,00	98,84
	- Bintek kepelatihan olahraga untuk guru penjaskes SD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	- Pemagaran/pembentengan SMPN 2 Baregbeg	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90
	- Pembangunan RKB SDN 5 Kiarapayung	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90
	- <b>Penatausahaan bantuan (BOS) SMP</b>	<b>34.848.000.000,0</b>	-	<b>0,00</b>
	- <b>Penatausahaan bantuan (BOS) SD</b>	<b>76.459.202.000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>			
	- Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
	- Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	- Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Ujian nasional paket A, B dan C	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	- Pengarusutamaan gender (PUG)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00



bidang pendidikan				
			Dipindahkan	
1	2	3	4	5
	- Akreditasi kelembagaan pendidikan non formal	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	- Lomba lembaga PTK kursus berprestasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>			
	- Pelaksanaan sertifikasi pendidik	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	- Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)	40.000.000,00	38.150.000,00	95,38
	- Diklat pengembangan diri guru kelas	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
	- Proses seleksi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah	265.000.000,00	265.000.000,00	100,00
	- Penyiapan pengembangan keprofesian berkelanjutan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	- Penilaian kinerja kepala sekolah TK, SD, SMP	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan tunjangan profesi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>			
	- Pembinaan komite sekolah	50.000.000,00	47.500.000,00	95,00
	- <b>Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan</b>	<b>181.250.000,00</b>	<b>159.073.050,00</b>	<b>87,76</b>
	- <b>Bimbingan teknis guru pembimbing inklusif (GPI)</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>49.000.000,00</b>	<b>65,33</b>
	- Statistik dan profil pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	- Penilaian Angka Kredit PAK	112.500.000,00	111.550.000,00	99,16
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	833.118.002.069,00	790.080.044.262,00	94,83
	- JUMLAH	987.795.627.069,00	827.988.006.406,00	<b>83,82</b>

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember tahun Anggaran 2017

Dilihat dari tabel 1.2 Data Anggaran dan Realisasi Keuangan serta Target Kinerja per 31 Desember 2017 diatas, tentang ikhtisar pencapaian kinerja anggaran Dinas Pendidikan yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan anggaran tahun 2017 bahwa akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dikatakan rendah karena tidak mencapai target (100%) yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya program dan kegiatan yang tidak mencapai target 100% dari realisasinya, ada yang hanya mencapai 61,19% bahkan ada yang 0,00% dari yang telah ditargetkan.

Selain itu, tidak tercapainya target realisasi belanja menyebabkan adanya selisih lebih anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 159.807.620.663 hal ini membuktikan bahwa kurang efisiennya pengeluaran pemerintah. Besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan kemampuan aparat daerah dalam penganggaran, SiLPA dikatakan buruk apabila program-program banyak yang tidak terealisasikan atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ada beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan seperti, pelaksanaan kegiatan di masing-masing BPP banyak mengalami perubahan, baik jenis kegiatan mapupun waktu penyerapan dalam anggaran kas yang telah direncanakan. Hal ini merupakan penyesuaina dari kebijakan kegiatan di tingkat pusat maupun provinsi sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.

Selanjutnya hambatan yang dihadapi adalah kurang optimalnya koordinasi masing-masing BPP dengan Sub Bagian Keuangan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan SKPD dan masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola para BPP.

Adanya penambahan dan perubahan kebijakan teknis dalam kegiatan yang sumber dananya dari Bantuan Propinsi Jawa Barat dalam kegiatan pengadaan buku, di mana dalam pengadaannya melalui kontrak payung oleh LKPP sehingga berdampak terhadap prestasi kinerja SKPD, karena tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan. Sejalan dengan gagasan dan fenomena permasalahan yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015-2017”**.

## **B. Fokus Masalah/Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat memfokuskan permasalahan yang ada yaitu target dari realisasi anggaran tidak mencapai hasil maksimal, masih adanya SiLPA (Selisih Lebih Anggaran) dari anggaran yang

telah ditetapkan, serta terjadinya penurunan realisasi anggaran belanja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwasannya terdapat permasalahan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015-2017?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015-2017.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Dapat memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.
  - b. Memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian yang tertarik melakukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hal yang didapat dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang positif, sebagai kontribusi untuk lebih memperhatikan pengelolaan keuangan daerah dalam menunjang akuntabilitas keuangan.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk berlatih dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan sehingga diperoleh pengalaman praktis.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:20) yaitu sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ellwood 1993 (dalam Mardiasmo 2002:21) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

terhadap hukum dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik dan dalam menjalankan tugas.

- b) Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c) Akuntabilitas Program, Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d) Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dengan demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan Undang-Undang yang berlaku (Halim, 2011).

Menurut Halim (2012: 29-30), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

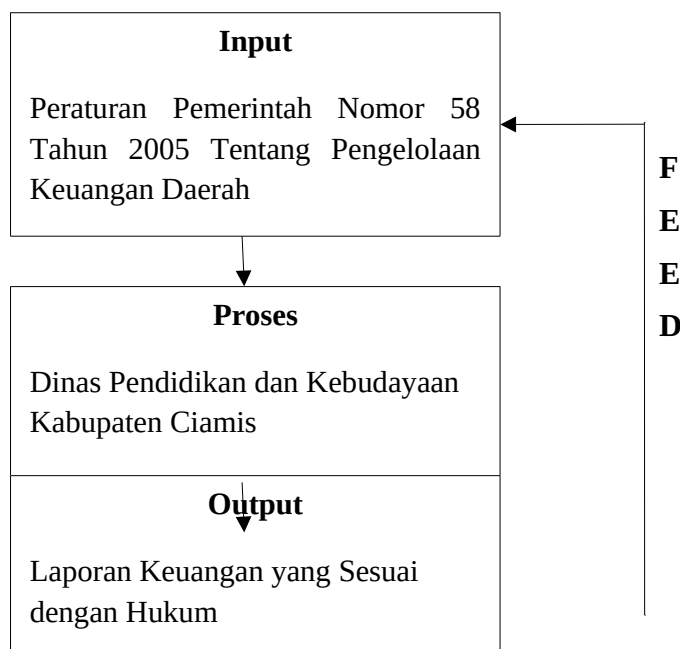
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Halim: 2007). Menurut LAN dalam Akuntabilitas dan *Good Governance* (2000), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi hak dan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun kekayaan daerah tersebut.

Dengan adanya pernyataan di atas, maka penulis berpendapat bahwa adanya pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Peranan antara kedua hal akan disajikan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.2**

### **Kerangka Pemikiran**



**B**  
**A**  
**C**

**K**



**Uin**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG